

Draft awal

**CATATAN DAN REKOMENDASI LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2018

BIDANG PEMERINTAHAN

PENDAHULUAN

Bidang pemerintahan DI. Yogyakarta tahun 2018 banyak mengalami kemajuan, khususnya dalam pencapaian target yang dicanangkan. Pemberdayaan aparatur sipil negara (ASN) sudah banyak dilakukan untuk tujuan peningkatan sumberdaya dalam bidang pemerintahan. Proses pemberdayaan yang dilakukan pada aparatur sipil negara (ASN) harus tetap dilanjutkan untuk perbaikan, tata pemerintahan di DI. Yogyakarta. Dalam bidang pemerintahan, di DI. Yogyakarta mencakup beberapa bidang, yang masih diharapkan bisa mengalami perbaikan-perbaikan di banyak bidang mulai dari bidang pemerintahan, sosial kemasyarakatan, kebencanaan, hingga pada pengembangan informasi teknologi dalam bidang pemerintahan.

1. Urusan pemerintahan

Kemajuan urusan pemerintahan di DI. Yogyakarta selalu menjadi perhatian banyak khalayak. Mulai dari aktivis LSM, akademisi, pemerintah daerah lain, hingga oleh stakeholder pemerhati kebijakan. Perhatian banyak pihak tersebut dikarenakan DI. Yogyakarta menjadi salah satu acuan pengembangan tata pemerintahan di Indonesia. DI. Yogyakarta banyak dijadikan contoh dan tauladan dalam pengembangan tata pemerintahan maupun dalam persoalan kebijakannya.

Dari laporan LKPJ, tata pemerintahan di pemerintah daerah DI. Yogyakarta cukup banyak melakukan pengembangan sumberdaya, khususnya pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Tentu saja beberapa kebijakan lain yang dikembangkan juga perlu diapresiasi, khususnya beberapa peraturan daerah yang mendorong perbaikan kinerja kelembagaan dan kebijakan pembangunan. Prestasi yang patut diapresiasi adalah DI. Yogyakarta mampu mempertahankan WTP dalam kinerjanya.

2. Sosial kemasyarakatan

Peristiwa pemilu dalam setiap tahun di Indonesia selalu membawa perubahan wacana sosial dan politik kewargaan. Masyarakat yang semakin pintar dengan banyaknya akses informasi tentu saja mempunyai pendapat sendiri dalam membangun wacana sosial politik. Informasi masuk deras melalui smart phone telah mengubah pola pikir kewargaan, mulai dari wacana sosial, wacana ideologi politik, hingga pada sikap kerukunan kewargaan yang bergeser. Perpecahan pandangan ideologi politik semakin mencemaskan di DI. Yogyakarta. Citra Yogyakarta sebagai kota pendidikan, budaya, ramah dan intoleran (City of tolerance) semakin terganggu dengan banyaknya persoalan sosial kewargaan yang terpolarisasi konflik sosial.

3. Kebencanaan

Kemampuan dan daya dukung lingkungan DI. Yogyakarta makin lama makin buruk. Peristiwa banjir di kawasan Bantul selatan pada tahun 2017 dan tahun 2019 menunjukkan bahwa DI. Yogyakarta mengalami krisis lingkungan, khususnya kawasan konservasi daerah utara. Berkurangnya area konservasi tanah dan air, hilangnya area pertanian produktif, hingga kerusakan lingkungan karena pertambangan menyebabkan daya dukung lingkungan menurun. Persoalan ini belum lagi ditambah minimnya konservasi air rumah tangga perkotaan dan menurunnya air permukaan untuk keperluan air bersih masyarakat kota. Kesalahan kebijakan penentuan dan peruntukan kawasan menjadi catatan tersendiri untuk segera diperbaiki jika tidak ingin terjadi bencana lokal.

Selain memperbaiki kualitas lingkungan, pemerintah daerah DI. Yogyakarta diharapkan terus melakukan pendidikan kebencanaan, baik dengan cara menambah kader-kader tanggap bencana, pemberian fasilitas alat-alat tim kebencanaan, pendidikan komunitas pemberi bantuan kebencanaan, hingga pada penambahan jumlah desa siaga bencana.

4. Pengembangan tata pemerintahan desa

Persoalan kemiskinan, kesenjangan pendapatan, hingga kesenjangan pembangunan infrastruktur kawasan pedesaan telah menyebabkan desa-desa mengalami kesulitan dalam pengembangan tata pemerintahan. Persoalan tersebut tentu harus direspon dengan mendorong pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa untuk terus menempatkan agenda desa membangun dalam memperjuangkan kesejahteraan warga. Potensi desa-desa di DI. Yogyakarta tentu saja harus terus dikembangkan melalui perbaikan penyelenggaraan tata pemerintahan sebagai ujung tombaknya.

5. Pengembangan program desa – desa perbatasan

Perhatian pemerintah daerah DI. Yogyakarta untuk membangun kawasan desa dalam wilayah perbatasan dengan propinsi lainnya, harus menjadi perhatian khusus. Kantong-kantong kemiskinan dan ketertinggalan infrastruktur pembangunan banyak ada di kawasan perbatasan. Tentu saja prioritas pembangunan desa kawasan perbatasan menjadi penting, khususnya untuk menyongsong rencana pembangunan jangka panjang hingga 2038 yang melakukan konsolidasi sumberdaya kawasan pedesaan.

Harapan pembangunan kawasan pedesaan perbatasan adalah mempersiapkan sumberdaya yang ada di kawasan tersebut untuk mempunyai bekal daya saing jika ada perubahan-perubahan kebijakan pembangunan.

6. Keistimewaan Yogyakarta

Prestasi kebijakan dan program Keistimewaan Yogyakarta dari tahun ke tahun makin meningkat. Penyerapan anggaran yang ada dalam program dan kegiatan Keistimewaan Yogyakarta juga makin membaik. Tentu saja prestasi tersebut patut dibanggakan.

Program dan kegiatan yang bisa dilihat seperti kebijakan pembentukan perda keistimewaan, pertanahan, budaya dan lainnya mulai berjalan dengan baik.